



PIDATO

MENTERI KEUANGAN

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PADA

**RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2022

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Salam Sehat, Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

[Pendahuluan]

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

1. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita telah sampai pada pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
2. Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa detail dan konstruktif dalam pembahasan RAPBN baik di tingkat Komisi maupun Badan Anggaran, sehingga seluruh proses pembahasan RUU APBN Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.
3. Pemerintah dan Anggota Dewan memiliki kesepakatan bahwa APBN 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan.

[Capaian Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi]

Bapak Ibu yang kami hormati,

4. Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam mengatasi pandemi Covid-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, dan kebijakan dukungan stimulus sebagai bantalan perekonomian bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 secara sangat baik.
5. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada Q2 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain.
6. Akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021. Beberapa negara maju dan berkembang seperti Jepang, Italia, Thailand, dan Meksiko, sampai dengan Semester I tahun 2022 perekonomiannya masih belum kembali ke level prapandemi.
7. Dengan pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, namun Indonesia tetap mampu menjaga APBN secara hati-hati. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menjaga defisit APBN-nya relatif rendah dan menurun secara cepat. Akumulasi defisit APBN selama pandemi tahun 2020-2021 hanya 10,7% terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara lainnya, seperti Amerika Serikat, India, serta Inggris yang memiliki akumulasi defisit melebihi 20% terhadap PDB dalam dua tahun pandemi. Ini artinya, kita – Indonesia, mampu menggunakan APBN secara efektif dan

efisien serta hati-hati dan terukur sebagai instrumen kebijakan dalam mengatasi dampak pandemi dan memulihkan ekonomi.

8. Belum selesai dengan tantangan Pandemi Covid-19, dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara, telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Ini mengakibatkan tingkat inflasi yang sangat tinggi di Amerika, Eropa, dan Inggris, yaitu inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah dengan dukungan DPR segera menetapkan langkah strategis dengan meningkatkan alokasi belanja untuk subsidi dan kompensasi lebih dari tiga kali lipat untuk BBM dan listrik, yaitu sebesar Rp502 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan *shock* kenaikan harga secara ekstrim yang mengancam daya beli rakyat dan perekonomian. Pemerintah juga menambah anggaran perlindungan sosial secara signifikan. Kebijakan ini dilakukan sebagai perwujudan dari peran APBN sebagai instrumen stabilisasi (*shock absorber*) sehingga dampak kenaikan harga komoditas di tahun 2022 dapat ditekan seminimal mungkin.
9. Dalam menangani pandemi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian domestik dan global, APBN telah menjalankan fungsinya sebagai *fiscal policy tools* yang digunakan secara tepat dan hati-hati. APBN bergerak cepat dalam memberikan respon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi,

namun juga mampu menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal sebagai fondasi bagi perekonomian di tahun 2023.

10. Keberhasilan ini merupakan suatu hasil kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah dan DPR RI, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama dan bergotong-royong kita mampu secara optimal mengatasi dampak pandemi yang luar biasa bagi jiwa rakyat dan perekonomian Indonesia.

[Arah Kebijakan APBN 2023]

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

11. Tantangan gejolak ekonomi dunia sungguh sangat nyata dan kita dapat lihat dan rasakan pada proses pembahasan RAPBN 2023 ini. Sejak Pemerintah dan DPR membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal pada pada bulan April hingga pengambilan keputusan hari ini, kita menyaksikan seluruh indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2023 bergerak sangat dinamis dan bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas tinggi.
12. Selama satu bulan terakhir, beberapa indicator bergerak sangat cepat. Harga minyak dunia dan CPO mengalami penurunan, sementara mata uang beberapa negara mengalami volatilitas yang luar biasa. Selama tahun 2022, nilai tukar mata uang berbagai negara terhadap Dolar Amerika mengalami koreksi yang sangat tajam. Yen Jepang telah mengalami depresiasi 25,8%, Renminbi China mengalami depresiasi 12,9%, dan Lira Turki mengalami depresiasi 38,6%. Demikian juga yang terjadi dengan negara-negara tetangga kita, Ringgit Malaysia terdepresiasi 10,7%, Baht Thailand terdepresiasi 14,1%, dan Peso Filipina terdepresiasi

15,7%. Dalam periode yang sama nilai tukar rupiah juga mengalami depresiasi sebesar 6,1%.

13. Kita juga menyaksikan bahwa inflasi di negara-negara maju yang sebelumnya selalu *single* digit atau mendekati 0% dalam 40 tahun terakhir, sekarang melonjak mencapai *double* digit. Bahkan inflasi di Turki mencapai 80,2% dan di Argentina mencapai 78,5%.
14. Inflasi yang sangat tinggi ini telah mendorong respons kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya, dengan sangat agresif menaikkan suku bunga yang menyebabkan gejolak di sektor keuangan dan arus modal keluar (*capital outflow*) dari negara-negara *emerging* hingga mencapai \$9.9 billion atau setara Rp148,1 triliun ytd sampai dengan 22 September 2022. Hal ini menyebabkan tekanan pada nilai tukar di berbagai negara *emerging*.
15. *The Fed* baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, artinya sejak awal kenaikan suku bunga oleh *Federal Reserve* sudah mencapai 300 basis poin. Kenaikan suku bunga di berbagai negara, terutama negara maju jelas akan meningkatkan *cost of fund* dan mengetatkan likuiditas yang harus kita waspadai secara sangat hati-hati.
16. Kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi berpotensi akan mempengaruhi kinerja ekonomi global pada tahun 2023, yaitu potensi mengalami koreksi ke bawah. Inflasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat akan mengakibatkan stagflasi. Negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang merupakan penggerak perekonomian dunia berpotensi mengalami resesi pada tahun 2023.

17. Kami menyampaikan gambaran gejala ekonomi global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir dan gentar - namun untuk memberikan *sense* bahwa gejala perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan kita hadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan *prudent* dan hati-hati. APBN 2023 tentu terus diharapkan menjadi instrumen efektif dalam penjaga perekonomian, namun APBN 2023 jelas akan terus diuji dengan gejala ekonomi yang tidak mudah dan belum mereda.
18. Keputusan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 adalah keputusan yang benar dan sungguh sangat penting, strategis dan tepat waktu. Setelah 3 tahun kita dihadapkan pada pandemi dan konsekuensinya yang menyebabkan defisit APBN meningkat melebihi batas 3% PDB, mengembalikan kesehatan APBN adalah langkah bijak dan tepat dihadapkan pada ketidakpastian global dan kenaikan *cost of fund* yang luar biasa cepat dan tinggi.
19. Defisit APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, Pemerintah dan DPR juga menyepakati bersama, bahwa APBN tahun 2023 masih membutuhkan Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan sebaik mungkin.
20. Secara bertahap defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 4,57% dalam APBN Tahun 2021, dan 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022. Dengan kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar yang telah menyebabkan gejala di sektor keuangan, maka defisit yang lebih rendah memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian.

21. Instrumen APBN akan difokuskan untuk terus mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah harus berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional dan mendesain APBN 2023 agar memiliki fleksibilitas **sebagai instrumen stabilisasi atau *shock absorber*** dalam melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga pemulihan ekonomi nasional yang semakin kuat.

[Asumsi Makro dan Target Pertumbuhan 2023]

Sidang Dewan yang terhormat,

22. Sebagai wujud kesamaan pandangan, Pemerintah dengan DPR RI, menyepakati bahwa pada APBN 2023:

- (i) **Inflasi dinaikkan dari semula 3,3% menjadi 3,6%**, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global,
- (ii) **Penyesuaian nilai tukar Rupiah dari semula Rp14.750,00/US\$ menjadi Rp14.800,00/US\$,** terutama mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global serta kenaikan suku bunga di negara-negara maju dan ketatnya kondisi likuiditas global,
- (iii) Menyepakati asumsi **ICP tetap berada pada level US\$90/Barel**, dengan pertimbangan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan,

(iv) **Lifting gas dinaikkan dari sebelumnya 1.050 (ribu bsmph) menjadi 1.100 (ribu bsmph).**

23. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka **proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%**. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan.
24. Ditinjau dari sumber-sumber pertumbuhannya, kinerja ekonomi di tahun 2023 terutama akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional. Tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat akan mendorong kinerja konsumsi dan memperkuat sisi produksi yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah bersama otoritas moneter akan berupaya mengendalikan inflasi agar harga komoditas pokok terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin. Penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran akan mewujudkan pemerataan pembangunan.
25. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong **tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (*gini ratio*)**

menjadi **0,375-0,378**, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran **73,31-73,49**.

[Target Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun Anggaran 2023]

Sidang Dewan yang terhormat,

26. Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp2.463,0** triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar **Rp2.021,2** triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp441,4** triliun. Target tersebut tentunya telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.
27. Tata kelola PNBPN akan dioptimalkan semakin baik. Peran PNBPN sebagai instrumen *regulatory*, akan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
28. Jika dilihat dari kondisi harga komoditas saat ini, target Pendapatan Negara tahun 2023 tersebut, terlihat optimis untuk dapat dicapai. Namun demikian, dinamika harga komoditas yang sulit diprediksi dan berisiko mengalami penurunan, dapat berimbas terhadap pencapaian target pendapatan negara, baik dari sisi pajak, kepabeanan dan cukai, maupun PNBPN. Oleh karenanya, kita tetap harus antisipatif mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan APBN di tahun 2023, apabila harga komoditas tidak setinggi seperti yang diasumsikan.
29. Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2023 direncanakan sebesar **Rp3.061,2** triliun, yang dialokasikan melalui Belanja

Pemerintah Pusat sebesar **Rp2.246,5** triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar **Rp814,7** triliun.

30. Belanja Negara tersebut diarahkan untuk:

- (i) Melanjutkan reformasi terutama dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi,
- (ii) Melanjutkan agenda pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan EBT, dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, serta
- (iii) Meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta meningkatkan sinkronisasi belanja bantuan Pemerintah.

31. Transfer ke Daerah akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah.

[Penutup]

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,

32. Menyadari dinamika global masih akan berlangsung, kami mohon dukungan DPR untuk dapat terus menjaga APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting dalam melindungi

masyarakat dan perekonomian. Fleksibilitas APBN tetap diperlukan namun tetap akuntabel.

33. Dalam menghadapi tantangan ketidakpastian yang masih eskalatif yang akan kita hadapi pada tahun 2023, Pemerintah sangat menghargai dukungan DPR untuk dapat melanjutkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif, dan terkoordinasi agar Indonesia tetap tangguh dan tumbuh, bertransformasi menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan merata.
34. *“Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”* (QS Al-Baqarah: 112). Semoga kita semua terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga Indonesia, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. InsyaAllah Indonesia akan dapat melalui masa-masa penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dalam lindungan Allah SWT.

Wallaahul muwaafiq ilaa aqwaamithaariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Jakarta, 29 September 2022

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati